

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung.
- Andi Wibowo Richo, et.al, 2024, *Hukum Administrasi Negara: Konsep, Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus*, PT Raja Grafindo, Yogyakarta.
- Anggriani Jum, 2011, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Penerbit Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta.
- Asshidduqie Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Cahyadini Amelia, et.al, 2023, *Hukum Pengawasan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Cipto Handoyo B. Hestu, 2018, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Effendie Lotulung Paulus, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Edisi Kedua, Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Fakhry Amin, et.al, 2023, *Ilmu Perundang-undangan*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Farida Indrati S. Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta
- Huda Ni'matul dan Nazriyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Huda Ni'matul, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusa Media.
- Jainak Zainab Ompu, et.al, *Pelaksanaan Pembatalan Peraturan Daerah di Indonesia*, UBL Press Universitas Bandar Lampung: Lampung.
- M. Friedman Lawrance, 2024, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial terjemahan dari The legal System: A Social Science Perspective*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Manan Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 2001, *Menyongsong Fajar Ekonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta

Muchan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

ND Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta.

Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

SW. Sumardjono Maria, 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syafrudin Ateng, 1991, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Maju Bandar, Bandung.

Jurnal

Armin Ulfa, *et.al*, Analisis Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintah daerah, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2023, Vol. 3, No.2.

Asyraf Fawwaz, Teori Perkembangan Etika Lingkungan Dalam Pengaruhnya Terhadap Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat, *Jurnal Yustitia*, 2024, Vol. 10, No. 1.

Budiyono, *et.al*, Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 3.

Endah Kiki, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Moderat (Modern dan Demokratis)*, 2016, Vol. 2, No. 2.

Gunarto Edy, Mokodompit Eliyanti Agus, Dampak Pencemaran Limbah Tambang Nikel Terhadap Kehidupan Masyarakat Pesisir, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2024, Vol. 4, No. 4.

Ika Septiani Ela, Adrinoviarini, Jelajah Konawe Kepulauan: Dari Pejuang Muda Kementerian Untuk Indonesia, *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2022, Vol. 1, No. 1.

Liani Lusy, Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah terhadap Peraturan daerah: Studi Pasca-adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2.

- Lule Alwadud, Dualisme Pengujian Peraturan Daerah: Legitimasi Konstitusional dan Mengakhiri Ambivalensi Penyelesaian Hukum, *Jurnal Credido*, Vol. 3, No. 2.
- Lutfi Zaki Muhammad, *et.al*, Dinamika Urusan Pemerintahan Konkuren pada Pemerintah Daerah, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2025, Vol. 3, No. 1.
- Mahmuzar, Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2020, Vol. 50 No. 2.
- Mulya Dharma Agung Eka, *et.al*, Sanksi Administratif terhadap Bupati/Walikota dalam Rangka Pengawasan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, *Unes Journal of Swara Justisia*, 2025, Vol. 8, No. 4.
- Mulyani Tri, Handitya Binov, Implikasi Pasca Pencabutan Kewenangan pemerintah untuk Membatalkan Peraturan Daerah, *Adil Indonesia Jurnal*, 2020, Vol. 2, No. 2.
- Nasokah, Implementasi Regulatory Impact Assessment (RIA) Sebagai Upaya Menjamin Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah, *Jurnal Hukum*, 2008, Vol. 15, No. 3.
- Novita Sari Desty, Dkk., Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara, “*Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*”, 2024, Vol. 1, No. 4.
- Nugraha Dwi Putra dan Muhammad Daafa’a Alhaqqy, Analisa Polemik dan Apologi Pemekaran Provinsi Baru dalam Penyelenggaraan dan Penerapan Otonomi Daerah, *Law, Development & Justice Review*, 2022, Vol. 5, No. 2.
- Nur Sholikin M, Penghapusan Kewenangan Pemerintah untuk Membatalkan Perda: Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif dan Pelaksanaan Hak Uji Materiil MA, *Rechts Vinding*, 2017.
- R. Hadiz Vedi, Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspective, *Development and Change*, 2004, Vol. 35, No. 4.
- Rifa’i Muhammad, Zarkasi Hartati, A., Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, “*Hangoluan Law Review*”, 2024, Vo. 3 No. 2.
- Riski Amelia Juni, Analisis Kritis Peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, Vol. 9, No. 1.
- Sandri Ritonga Joni, *et.al*, Application of General Principles of Good Governance in State Administrative Court Decisions, *Case Law: Journal of Law*, 2025, Vol. 4.

Wirazilmustaan, dkk., Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan dengan Corak Otonomi Luas, *Jurnal Hukum Progresif*, 2018, Vol. XII, No. 2.

Yuswanto, Al Arif M. Yasin, Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, *Jurnal Konstitusi*, 2018, Vol. 15, No. 4.

Zelfi, *et.al*, Pembatalan Kewenangan Pencabutan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang 9 Nomor 2015 atas Perubahan Kedua tentang Pemerintah daerah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, *Open Jurnal Universitas Pamulang*.

Website

Aris Yusuf M, Tujuan Otonomi Daerah: Prinsip dan Asas-asasnya, Gramedia Blog, 2020, https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-otonomi-daerah/?srsrtid=AfmBOoqOicmE_zdLTChiB07DD6P8PS2k8QW56Iw3WzZrg590zmoGcGGJ, diakses pada 2 Agustus 2025.

Ayu Pramesti Tri Jata, Prosedur Uji Materiil Perda di Mahkamah Agung, 2015, hukumonline.com, diakses pada 17 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-uji-materiil-perda-di-mahkamah-agung-lt559a47cad176c/>.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Profil Kabupaten Konawe, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, <https://sultra.bpk.go.id/wilayah-pemeriksaan-kabupaten-konawe/>, diakses pada 21 Juli 2025.

Harita Nickel, 2025, 5 Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, <https://tbpnickel.com/id/5-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia>, diakses pada 4 November 2025.

Heriani Novia Fitri, 2021, Jokowi Teken Keppres Satgas Percepatan Investasi, ini tugasnya, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jokowi-teken-keppres-satgas-percepatan-investasi--ini-tugasnya-lt60bde2cdd0594>, diakses pada 4 November 2025.

Inspektorat Daerah, 2016, “Jenis-Jenis Pengawasan”, Website Inspektorat Daerah kabupaten Buleleng, diakses pada 17 Februari 2025, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>

Inspektorat Daerah, 2016, “Pengertian Pengawasan”, Website Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, diakses pada 17 Februari 2025,

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Desakan kepada Kejaksaan Agung untuk Menyelediki Dugaan Korupsi dalam Kasus Pertambangan Ilegal PT Gema Kreasi Perdana, 2025, <https://jatam.org/id/lengkap/Korupsi-Pertambangan-Ilegal-PT-Gema-Kreasi-Perdana>, diakses pada 26 Juli 2025.

Jordi Kastanya Efraim, Yang Termasuk Bagian Mengingat dalam Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Online, 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-termasuk-bagian-mengingat-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4fdb23af4a0d9/#_ftn2, diakses pada 6 Agustus 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “Kealpaan”, <https://kbbi.web.id/alpa>, diakses pada 10 Agustus 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “Kecermatan”, <https://kbbi.web.id/cermat>, diakses pada 10 Agustus 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata “Pengawasan”, diakses pada 17 Februari 2025, <https://kbbi.web.id/pengawasan>

Komite Pemantantauan Otonomi Daerah, Administrasi Pemerintahan Dalam RUU Cipta Kerja: Nota Pengantar (Background Note) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), KPPOD, Diakses pada 22 Februari 2025, [https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/KPPOD%20\(Klaster%20Administrasi%20Pemerintahan\)%200807.pdf](https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/KPPOD%20(Klaster%20Administrasi%20Pemerintahan)%200807.pdf).

Maulana Irfan, Pemerintah Abai Kerusakan kabaena Demi Nikel, MONGABAY, <https://mongabay.co.id/2025/05/12/pemerintah-abai-kerusakan-kabaena-demi-nikel/>, diakses pada 20 Agustus 2025.

Pemerintah Kabupaten Bombana, Geografis dari Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, [bombana.go.id, https://bombanakab.go.id/page-geographic](https://bombanakab.go.id/page-geographic), diakses pada 20 Agustus 2025.

Ramadhan Firdaus Fahmi, 2021, Perumusan Batasa Sanksi Pidana dalam Perda, Hukum Online, diakses pada 22 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perumusan-batasan-sanksi-pidana-dalam-perda-lt60bf4b404df9b/>.

Ridwanuddin Parid, 2022, “Temuan-Temuan Lapangan Dampak Pertambangan Nikel di Pulau Wawoni’I Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara”, Organisasi WALHI, diakses pada 12 Februari 2025, <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Temuan%20Lapangan%20Tambang%20Nikel%20di%20Wawonii.pdf>.

Sani Abdul, 2017, Otonomi Daerah Esensi, Tujuan dan Manfaatnya Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, diakses pada 7 Februari 2024, <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung>.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Ambisi Kendaraan Listrik dan Tragedi Ekologis di Pulau Wawonii, 2022, <https://www.walhi.or.id/ambisi-kendaraan-listrik-dan-tragedi-ekologis-di-pulau-wawonii>, diakses pada 1 Agustus 2025.

Yuli, Tambang Nikel Harita di Pulau Wawonii ‘Membunuh Kami Secara Halus’, Project Multatuli, 2024, <https://projectmultatuli.org/tambang-nikel-harita-di-pulau-wawonii-membunuh-kami-secara-halus/>, diakses pada 3 Agustus 2025.

Berita

Argawati Utami, 2024, “Saksi Ungkap Dampak Aktivitas Pertambangan di Pulau Wawonii”, Berita Mahkamah Konstitusi, diakses pada 12 Februari 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19911&menu=2>.

Jemali Videlis, 2019, Pembangunan Konawe Kepulauan Fokus Ekonomi Berkelanjutan, Kompas.id, <https://www.kompas.id/artikel/pembangunan-konawe-kepulauan-fokus-ekonomi-berkelanjutan>, diakses pada 18 Agustus 2025.

Tresna Arfana Nano, “Bimtek Bahas Konstelasi Peraturan Perundang-undangan”, Berita Mahkamah Konstitusi, diakses pada 19 Februari 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17426&menu=2>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034. Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 2.

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033. Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 20.

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041. Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2.

Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 1.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2023

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 P/HUM/2023.

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Lain-Lain

Aulia Y. Guzasiah Muhammad, 2018, "*Politik Hukum Pengaturan Pengawasan Peraturan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*", Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB), 2019, Laporan: Kajian dan Evaluasi Pancasila sebagai Kaidah Penuntun untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.

Bhenyamin Hoessein, et.al, 2005, *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota FISIP UI, Depok.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, 2023, Buku Profil Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, <https://www.konkepkab.go.id/uploads/20240625150538.pdf>, diakses pada 18 Agustus 2025.

Fahri Ginting Eriko, 2020, "*Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Pusat*", Skripsi Universitas Gadjah mada Yogyakarta.

Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023, 2024, 25 Tahun Merawat Kebebasan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Muhadi, 2009, "*Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah*", Skripsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Nur Sholikin M, et. al, 2011, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Nurbaningsih Enny, Perkuliahan di Kelas Mata Kuliah Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Magister Hukum Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 25 Mei 2024.

Setya Pratiwi Cekli, *et.al*, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.

Siti Sumartini, 2017, *Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Daerah Dalam Tinjauan Hukum*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Paper.

Taufikurahman M. Rizal, *et.al*, 2023, “Dampak Investasi Sektor Pertambangan Terhadap Konekta Ekonomi Nasional dan Regional, INDEF POLICY No. 07/2023.

Wawancara langsung kepada Bapak Andi Rahma selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara, dilakukan Via Zoom Meeting pada 14 Juli 2025.

Wawancara langsung kepada Bapak Wahyu Perdana Putra, S.H., M.H., Kepala Sub Direktorat Wilayah II, Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin, 30 Juni 2025.